

Dinamika Ruang Ekonomi Politik (Studi Tentang Pembangunan *Jogging Track* di Wilayah Kawasan Sempadan Pesisir Kelapa Lima Kota Kupang)

Wanda Kristina Pono^{1*}, Yeftha Yerianto Sabaat², Stefanus Triadmaja Briar³

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

^{2,3}Dosen Pembimbing I dan II Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Korespondensi penulis: kristinapono20@gmail.com*

Abstract. *This research aims to explain the dynamics of political economic space in the development of jogging tracks in the coastal border area of Kelapa Lima, Kupang City. In line with research, this research uses descriptive qualitative, in qualitative research using data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews from several informants. The author sees that the problem of building a jogging track in the coastal border area of Kelapa Lima is experiencing resistance from the surrounding community, therefore the author wants to dig deeper into the problems that occur in building a jogging track in the coastal border area of Kelapa Lima. From the research results, it can be concluded that the spatial practice indicators that occur cause local communities to be eliminated from that space, while the spatial representation indicators do not match what the community expects and the spatial representation indicators only benefit the government. Government domination causes people in coastal areas to experience cultural subjugation, just as government domination causes people to be eliminated.*

Keywords: *Dynamics, Jogging Track, Political Economy, Space*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dinamika ruang ekonomi politik dalam pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima Kota Kupang. Sejalan dengan penelitian, maka penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara dari beberapa informan. Penulis melihat bahwa permasalahan pembangunan *jogging track* di kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima mengalami resistensi dari masyarakat sekitar maka dari itu penulis ingin menggali lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi dalam pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator praktik spasial yang terjadi menyebabkan masyarakat lokal tereliminasi dari ruang tersebut sedangkan indikator representasi ruang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan indikator ruang representasi hanya menguntungkan pemerintah. Dominasi pemerintah membuat masyarakat di area pesisir mengalami ketertundukan kultural sebagaimana dominasi yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat tereliminasi.

Kata Kunci: Dinamika, Lintasan Joging, Ekonomi Politik, Ruang Angkasa

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini akan menjelaskan tentang dinamika ruang ekonomi politik, (studi tentang pembangunan *jogging track* wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima Kota Kupang). Perlu adanya perhatian dari pemerintah kota dalam pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima Kota Kupang. Penulis melihat bahwa permasalahan pembangunan *jogging track* di kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima mengalami resistensi dari masyarakat sekitar maka dari itu penulis ingin menggali lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi dalam pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa

Lima di era modern ini diskursus ekonomi politik ruang perkotaan menjadi salah satu tema penting dan menarik perhatian dari berbagai *stakeholder* baik di level global, nasional dan lokal. Namun fokus studi kritis-progresif tentang politik ruang perkotaan masih sangat terbatas.

Politik ruang perkotaan menjelaskan bahwa kota sebagai suatu arena kontestasi dan konflik kepentingan berbagai aktor dalam tata kelola ruang yang berimplikasi terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah perkotaan. Seperti halnya yang terjadi di Kota Kupang khususnya di Kelapa Lima menjadi ruang kontestasi kepentingan aktor. Kota pada umumnya dijadikan ruang bisnis namun pembangunan infrastruktur dalam ruang kota terkadang tidak memperhatikan substansi ruang yang ada. Daerah Kelapa Lima hampir 35% di isi oleh para pendatang terutama dari Jawa dan sebagainya.

Komposisi ini berdampak pada perputaran dan aktivitas ekonomi di Kelapa Lima karena para pendatang mendapat sumber penghasilan dari upaya berdagang salah satunya adalah kuliner dan berbagai sektor lainnya (bidang wiraswasta). Dahulunya pantai Kelapa Lima merupakan kampung nelayan dengan keseharian mereka setiap hari mencari nafkah dengan menjalani kegiatan melaut di sepanjang pesisir pantai berpasir putih, hal ini membuat masyarakat Kelapa Lima masih berada dalam taraf sosial ekonomi yang sederhana seperti nelayan yang turun ke laut masih mengandalkan alat penangkapan yang masih tradisional. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang berada di Kelapa Lima sebesar 820 jiwa yang sebagian besarnya memiliki keterbatasan pendidikan, kemampuan dan ketrampilan serta teknologi yang dimiliki, membuat mereka kurang mampu menghadapi tantangan alam. Karena hasil tangkap tidak menentu karena bergantung pada musim cuaca.

Kondisi ini membuat kehidupan sosial ekonomi para nelayan tidak menentu meskipun sudah ada peralatan yang digerak oleh mesin sekalipun, semua itu membuat masyarakat nelayan masih berada tetap pada posisi garis kemiskinan secara ekonomi. Kota Kupang merupakan kota karang yang terkenal dengan suhu udaranya yang cukup panas dan sangat beruntung memiliki pantai pesisir yang landai dan berpasir putih, sehingga seringkali digunakan masyarakat Kota Kupang sebagai tempat melepas lelah dan rekreasi, karena aksesnya yang sangat mudah dan cukup luas. Selain melepas lelah sekaligus berekreasi masyarakat juga dapat memperoleh kebutuhan akan ikan segar dari para nelayan Kelapa Lima yang melaut dan pulang dengan membawa hasil tangkapannya untuk dijual di sepanjang pantai Kelapa Lima. Dengan adanya garis pantai di sepanjang jalur Kelapa Lima membuat kawasan ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi *settlement* kota yang terbentuk secara linear dengan diisi oleh para nelayan pesisir pantai. Dengan berkembangnya Kota Kupang, maka semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kota ini, terutama

untuk menunjang industri pariwisata. Perlahan tapi pasti, kawasan ini mulai dilirik sebagai salah satu kawasan potensial dengan pembangunan industri perhotelan yang semakin hari semakin pesat pertumbuhannya dan berkembang, kontestasi pun mulai terbangun karena koloni nelayan yang tadinya membentuk *settlement* kota mulai dikooptasi oleh adanya bangunan hotel. Bermula dari satu hotel, kemudian berkembang dan disusul dengan hotel-hotel berikutnya sampai akhirnya mau tidak mau masyarakat kampung nelayan yang tadinya sudah memiliki habitat yang tepat dan sesuai sebagai koloni mereka mulai tergantikan dengan industri yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. ironisnya, penguasa atau pemerintah daerah sendiri tidak menyadari bahwa mendorong industri pariwisata dengan menghadirkan hotel-hotel di sepanjang pantai ini berakibat meniadakan ruang atau *space* bagi kawasan wisata itu sendiri karena pembangunan hotel yang mengokupasi lahan pesisir pantai ini juga diamini oleh pemerintah daerah dengan membangun *jogging track* di pesisir pantai yang tersisa. Masyarakat yang tadinya adalah nelayan, selain kehilangan kegiatan untuk bisa melaut dengan bebas juga tidak bisa menyesuaikan diri dengan hadirnya industri perhotelan yang memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi tersendiri, sehingga masyarakat nelayan kemudian dengan sendirinya tergeser dan terpinggirkan dari *settlement* yang terbentuk dari koloni mereka.

Pembangunan *jogging track* yang dikonsepsikan pemerintah kota yakni di wilayah pesisir Kelapa Lima, dengan tujuan memperindah wilayah pesisir yakni selain untuk menambah keidahan dari segi estetika kota juga dijadikan ruang olahraga bagi masyarakat Kota Kupang secara umum. Namun di satu sisi pembangunan *jogging track* dengan tujuan yang dimaksud oleh pemerintah kota ternyata berbenturan dengan keinginan masyarakat sekitaran Kelapa Lima yakni sebagian besar wilayah yang dibangun *jogging track* tersebut malah mempersempit ruang ekonomi masyarakat sehingga secara tidak langsung berdampak pada perekonomian masyarakat pesisir Kelapa Lima.

Dalam pembangunan *jogging track* pemerintah tidak secara langsung melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan tersebut maka dari itu timbulah gejolak dari masyarakatr sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan Henri Lefebvre bahwa ruang bukan suatu obyek yang hanya dapat dikonsumsi semata, akan tetapi ruang juga dapat dijadikan sebagai instrumen ekonomi-politik bagi kelas penguasa dan pengusaha dalam melakukan kontrol atas pemanfaatan ruang perkotaan (lefebvre, 1991). Pola pembangunan dan pengembangan ruang, infrastruktur perkotaan di Kota Kupang saat ini, persis seperti apa yang diungkapkan oleh David Harvey, bahwa sejak dari dulu kota muncul melalui konsentrasi sosial

dan geografis dari surplus produksi. Dibawah kapitalisme, kontrol surplus produksi berada di tangan kelas pemilik modal atau kapitalis.

Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika ruang ekonomi politik pada pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima Kota Kupang?

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori Produksi Ruang. Menurut lefebvre (1991), produksi ruang sangat terkait dengan berbagai praktek yang dilakukan oleh manusia serta bagaimana praktek-praktek tersebut berinteraksi dengan unsur-unsur ruang baik yang dapat dideteksi oleh indera maupun yang terkonsepsi dalam pikiran manusia. Henri lefebvre secara kritis mengemukakan tiga konsep penting yang menjadi kunci dalam pemahamannya yang komprehensif atas ruang yang sering disebut sebagai “momen-momen produksi ruang”. Di satu sisi, Lefebvre merujuk pada konsep triadik/tripartit yaitu praktik spasial (*spasial practice*), representasi ruang (*representation of space*) dan ruang representasional (*representational space*) (lefebvre, 1991: 38-39; schmid dalam goonewardana, 2008: 29). Namun, di sisi yang lain, Lefebvre juga merujuk pada apa yang disebutnya sebagai *perceived space*, *conceived space* dan *lived space*. Triad konseptual inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai praktik memproduksi ruang yang dilakukan oleh manusia melalui relasi produksi pada sebuah relasi dan praktik sosial. Pertama, praktik spasial adalah mengapropriasi ruang-ruang fisik tempat praktik sosial terjadi atau berlangsung. Apropriasi dapat berupa tindakan fisik dan konkret memberi tindakan atau, melalui konstruksi ilmu pengetahuan yang memungkinkan praktik pemaknaan terhadap ruang, yang merupakan sebuah penfungsian spesifik terhadap ruang (*specific use of space*). Kedua, representasi ruang merupakan ruang normatif, ruang ideal, ruang konseptual yang dirumuskan dan dikonseptualisasi secara terstruktur oleh para arsitek, ahli planologi, teknokrat, insinyur sipil, dan pemerintah. Menurut lefebvre, ruang ini adalah ruang dominan di banyak masyarakat. Abstraksi secara terus- menerus diwacanakan pada akhirnya menjadikan ruang runtuh ke dalam representasi. Ruang abstraksi dalam pikiran para ahli tersebut hanya mungkin dikonkretkan melalui sistem representasi bahasa dan tanda- tanda yang spesifik (lefebvre, 1991: 38-39). Ruang representasi ini, bagi lefebvre adalah “ruang yang sebenarnya” yang dijadikan alat untuk mencapai dan mempertahankan dominasi. Dan yang ketiga, ruang representasional merupakan ruang yang secara nyata langsung ditempati dan ditinggali oleh warga dan penggunaanya (lefebvre, 1991: 38- 39). Menurut Lefebvre, dalam ruang representasional ini, kita dapat melihat semacam pewujudan simbolisme yang kompleks, kadang-kadang semacam kode, baik berupa artikulasi tindakan, perilaku, hasrat, ritual-ritual

tertentu dan gaya hidup-sebagaimana dikonseptualisasikan di dalam representasi ruang (lefebvre, 1991: 33). Dalam penelitian ini juga peneliti ingin melihat bagaimana ekonomi politik bekerja dan mempengaruhi kegiatan praktik spasial.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik pokok, yakni mementingkan makna, konteks dan dalam proses penelitian yang lebih bersifat siklus dari pada linear. Dengan pengumpulan data dan analisa data berlangsung secara simultan, lebih mementingkan kedalaman ketimbang keluasan penelitian, sedangkan peneliti sendiri merupakan instrument utama.

Pemilihan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan menganalisis mengenai bagaimana proses dinamika ruang ekonomi politik dalam pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima Kota Kupang. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan fokus penelitiannya diarahkan lebih kepada dinamika yang terjadi yang dilihat dalam praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasional.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan tentang makna dari topik yang menjadi permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan tentang dinamika ekonomi politik dalam pembangunan *jogging track*. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di wilayah sempadan pesisir Kelapa Lima Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Ruang Ekonomi Politik (Pemerintah Dan Masyarakat)

Ekonomi politik merupakan bidang yang berhubungan antara politik dan ekonomi dianggap sebagai suatu sistem saling terkait, dimana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat dan sebaliknya. Untuk tata ruang sendiri dapat diartikan menurut ahli Lefebvre adalah produksi ruang sangat terkait erat dengan berbagai praktek yang dilakukan oleh manusia serta bagaimana praktek-praktek tersebut berinteraksi dengan unsur ruang. Baik yang dapat dideteksi dengan indera maupun yang terkonsepsi dalam pikiran manusia. Menurut pandangan awam biasanya persoalan ekonomi yang terjadi disuatu tempat maka pemerintah

akan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi.

Dalam pembangunan *jogging track* yang terjadi di daerah pesisir Oesapa telah menutupi seluruh permukaan pasir di bibir pantai. Jika dilihat dari Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 yang antara lain menyebutkan tidak boleh ada bangunan di ruang sempadan pantai, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Menurut ketentuan undang-undang, wilayah sempadan pantai hanya diperuntukkan untuk dua hal yakni kawasan konservasi dan akses publik. Di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang *jogging track* sudah dibangun sebagai strategi dari pemerintah dalam hal ini untuk penataan wajah kota karena *jogging track* lebih fleksibel dibangun. Pembangunan *jogging track* ini bermula dari gagasan atau rencana wilayah tata ruang itu membuat *water front city* jadi kota yang menghadap kelaut atau teras kota, sehingga untuk menuju implementasi ke *water front city* itu maka harus dibuat sebuah aksesibilitas untuk menarik orang kesitu. Sebetulnya ada kaitannya dengan ide Presiden Jokowi untuk tidak boleh membelakangi laut sehingga itu coba untuk diimplementasikan dalam sebuah ide kecil oleh Walikota Kupang pada tahun 2007-2012. Pembangunan yang didasari oleh ide yang dikeluarkan oleh Presiden dan diimplementasikan oleh Walikota di tahun tersebut dan akan dilanjutkan oleh Walikota yang akan menjabat berikutnya. Ini memang akan terus dilakukan karena pembangunan ini merupakan pembangunan jangka panjang. Jadi fungsi dari pembangunan *jogging track* ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan laut secara fisik. Masyarakat tidak hanya melihat tapi datang ke laut atau pantai dan menikmatinya. Pemerintah mengkonsepsinya menjadi suatu ekonomi baru bagi masyarakat dan mengingat kondisi ekosistem sekarang semua bangunan sudah membelakangi laut maka coba pemerintah memunculkan ide sederhana ini.

Mulanya pembangunan *jogging track* ini sudah berlangsung lama akan tetapi pada pembangunan tahap 1 dan 2 sudah dilakukan pada tahun 2010, tahun 2011 hingga tahun 2015 dan saat ini belum berjalan lagi akibat dari salah penempatan pembangunan yaitu M hotel. Merujuk pada pengertian ruang publik yang merupakan area ataupun tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok. Area ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata (*real space*) ataupun dunia maya (*virtual space*). Sedangkan ruang publik yang dimaksud oleh masyarakat ruang publik merujuk pada ruang terbuka di luar bangunan yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk berbagai aktivitas. Hasil yang didapatkan oleh

masyarakat ialah ruang publik yang tidak sesuai dengan ekpetasi masyarakat dan merugikan masyarakat dimana pembangunan *jogging track* yang sudah direncanakan oleh pemerintah tidak membuahkan hasil maksimal. Privatisasi dan tidak terlibatnya masyarakat dalam pembangunan *jogging track* membuat timbul pertanyaan tentang apa guna dari bangunan yang dibangun oleh pemerintah.

Praktik Spasial (Spasial Prakte)

Praktik sosial dalam perspektif Lefebvre selalu mengapropriasi ruang- ruang fisik tempat praktek sosial terjadi atau berlangsung. Praktik spasial ini merujuk pada cara ruang digunakan dan dialami dalam kehidupan sehari- hari. Ini mencakup bagaimana orang bergerak dan berinteraksi dalam ruang tersebut. Praktik spasial dalam dinamika ekonomi politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat merupakan ruang yang difasilitasi pemerintah terhadap masyarakat dalam hal ini pembangunan *jogging track* pada khususnya tidak mampu selesai didefinisikan di dalam teori karena ia selalu di produksi. Praktik spasial dalam pandangan Lefebvre selalu mengendalikan ruang-ruang fisik sebagai tempat praktik spasial terjadi. Pembangunan *jogging track* dalam mendukung pemetaan teras kota atau konsep awal pemerintah dalam hal ini membuka peluang ekonomi politik dilihat sebagai bentuk dari praktik spasial dimana pemerintah memberikan impresi bahwa pembangunan *jogging track* merupakan bentuk dari pemenuhan terhadap kebutuhan. jika dilihat dari segi ekonomi dari pembangunan *jogging track* ini masyarakat merasa rugi karena pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini memberi dampak buruk bagi masyarakat sekitar dimana masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu yang biasanya mata pencahariannya sebagai nelayan tidak memiliki akses yang bebas untuk masuk ke laut. Akhirnya yang awalnya budaya nelayan yang sudah diwariskan sejak dahulu lambat laun hilang dengan sendirinya. masyarakat yang dulu nelayan akhirnya menyesuaikan diri dengan beralih profesi dengan menjadi pedagang akibat dari adanya pembangunan *jogging track* ini. Awalnya mereka menyekolahkan anak mereka dengan menjual ikan dengan pendapatan yang mereka rasa cukup sekarang mereka merasa dirugikan. Ditambah lagi dengan adanya pihak berwajib yang melarang berjualan diarea *jogging track* membuat masyarakat resah karena mereka merasa dibatasi. Ruang publik yang diciptakan oleh pemerintah tidak bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat karena segala sesuatunya dibuat privatisasi dimana orang mau masuk untuk menikmati laut harus membayar. Sedangkan pandangan masyarakat mengenai ruang publik yaitu suatu ruang yang digunakan oleh semua orang tanpa batasan apapun dan gratis. Pemerintah membangunnya untuk kesejahteraan masyarakat tapi masyarakat merasa mereka hanya dirugikan dimana berdagang diarea itu tidak diizinkan lantas

janji yang diberikan diawal mengenai pembangunan yang akan menciptakan ekonomi baru bagi masyarakat tidak terealisasi. Pada akhirnya pun kepentingan masyarakat tidak terpenuhi. Sesuai dengan konsep praktik spasial yang dimana membahas tentang hal-hal yang bermunculan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek produksi dan hubungan pertukaran jikadilihat secara sekilas fenomena ini memang menguntungkan tetapi jika dilihat dari pendekatan ekonomi politiknya terdapat keuntungan besar yang diperoleh oleh pemilik modal (kapitalis) walaupun pada awalnya ruang tersebut diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana pelayanan publik.

Representasi Ruang (Representation of Space)

Adanya pengelompokan ruang sesuai dengan identifikasinya itu tidak pernah lepas dari konsep pada masyarakat umum atau kesepakatan beberapa orang dalam memberikan simbol terhadap ruang atau biasa dikenal dengan istilah ruang yang dikonsepsikan. Representasi ruang yang diciptakan oleh pemerintah seperti arena untuk rekreasi berolahraga dan sebagainya dikonsepsikan dalam pembangunan *jogging track* dan pantai menjadi salah satu ruang publik yang dapat merepresentasi konsep dari pemerintah. dari pemerintah mengkonsepsikan ruang dalam hal ini wilayah sempadan pantai itu adalah wilayah yang tepat untuk pembangunan *jogging track* dan bisa menjadi konsep Kota Kupang yang ramah kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, berrekreasi dan lain sebagainya. Tetapi apakah ruang yang dikonsepsikan oleh masyarakat juga sama dengan pemerintah atau hanya ruang yang hanya dilihat dari sisi pandang pemerintah. Ada ketidakyakinan mengenai konsep tentang pembangunan *jogging track* dari pemerintah dimana pemerintah merasa sempadan pantai merupakan wilayah yang tepat untuk pembangunan *jogging track* dan sudah sesuai dengan peraturan Perda Nusa Tenggara Timur. Tetapi dilihat dari segi masyarakat pembangunan di area pesisir akan menghilangkan identitas asli mereka sebagai masyarakat koloni asli yang sering melakukan aktivitas mereka diarea pesisir. masyarakat merasa ruang yang dikonsepskan pemerintah membuat identitas asli mereka dimana kebiasaan atau rutinitas yang biasa mereka lakukan hilang akibat dari pembangunan *jogging track* ini. sempat berjalan dan akhirnya terhenti juga. pemerintah tidak menghitung KDB dan KLB sehingga pada saat proses pembangunan *jogging track* antara daya tampung dan daya dukung akhirnya tidak seimbang. Daya tampung yang dimaksud dalam pembangunan *jogging track* adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wajib menjadi

pertimbangan dalam perencanaan tata ruang seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi jembatan bagi perencanaan tata ruang dalam pertimbangan utama yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemerintah daerah merencanakan dan mengembangkan wilayahnya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota juga memerlukan rencana operasional sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sektor yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR ini merupakan rencana rinci dari tata ruang wilayah yang memuat peraturan zonasi (PZ). Demikian halnya dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dalam penyusunannya wajib disusun KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan suatu wilayah. Untuk dapat memenuhi ketentuan sebagai acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, RDTR harus memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang jelas. Substansi RDTR kabupaten/kota harus memiliki kedalaman analisis dengan skala peta 1:5.000. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan yang berfungsi untuk melihat struktur ruang pada kota. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Pembangunan *jogging track* ini melakukan kesalahan awal dengan mengikuti RTRW provinsi tanpa melihat Perda RZWP3K semakin membuat pembangunan *jogging track* terpaksa berdiri diantara bangunan-bangunan yang ada. pembangunan *jogging track* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT tahun 2011-2031 berbenturan atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana wilayah sempadan pantai yang seharusnya 100 meter menjadi 15 meter dan dua fungsi yaitu fungsi konservasi dan fungsi akses publik pun tidak seimbang. Disamping itu juga melihat dari Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Undang-Undang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbenturan maka konsep awal dari pembangunan *jogging track*.

Ruang Repräsentasional (Repräsentational)

Ruang Representasi adalah ruang yang menurut Lefebvre penuh dinamika karena di ruang inilah berbagai kepentingan diartikulasikan melalui hasrat dan tindakan. Ruang Representasi: Pembangunan *jogging track* jika dilihat dari sudut pandang ruang representasi tetap saja melanggar aturan walaupun lokasi tersebut merupakan ruang strategis untuk pembangunan *jogging track*. Sebab ruang representasi ini berbicara tentang simbolik atas ruang sedangkan simbol utama pada lokasi *jogging track* dari pemerintah ini sebagai sarana sport yang memang dapat digunakan masyarakat, masyarakat merasa bahwa ide pembangunan *jogging track* yang diberikan oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak besar bagi mereka. Kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat dimana koloni asli dari masyarakat pesisir akan tergerus dan sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dengan hal tersebut. adanya pembangunan *jogging track* ini di wilayah pesisir Kelapa Lima, untuk memperindah dari segi estetika kota juga dijadikan ruang olahraga bagi masyarakat Kota Kupang secara umum. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang berada di Kelapa Lima dari tahun 2018- 2020 berjumlah sebesar 1.437 orang. Dari tahun ke tahun yang berprofesi sebagai nelayan perlahan-lahan beralih profesi dari nelayan menjadi pedagang kaki lima dan simak pada data sebagai berikut; 2018 (819), 2019 (390), 2020 (228). Jika dilihat dari data tersebut benar adanya bahwa dari tahun ke tahun nelayan yang beralih profesi menjadi pedagang kaki lima semakin meningkat. Jika dilihat dari segi pemerintah, pembangunan jangka panjang dengan mengkaji atau melihat yang berguna, disamping itu juga pembangunan *jogging track* ini memiliki manfaat untuk meningkatkan pariwisata dan menciptakan ekonomi baru bagi masyarakat jika dibangun *break water* sesuai dengan apa yang diminta masyarakat maka kawasan pesisir tidak mengalami perubahan. Pemecah ombak yang dibutuhkan masyarakat tidak direalisasi oleh pemerintah karena bukan pembangunan yang fleksibel. Solusi yang diambil oleh pemerintah untuk membangun *jogging track* semerta-merta untuk mencegah perahu atau sampan nelayan yang pada waktu badai terhempas sampai pada bahu jalan lalu lintas. Pemerintah membangun *jogging track* sebagai penahan laju dari perahu atau sampan sehingga pergerakan ketika dihantam ombak semakin melambat disamping itu *jogging track* juga menjadi sarana untuk mencari rejeki bagi masyarakat yang hidup di pesisir pantai. rencana pembangunan *jogging track* sudah ada dalam rencana tata ruang yang sudah ditetapkan akan tetapi lainnya pemerintah dengan tidak tegas dalam pengawasan wilayah sehingga hotel M Baratha salah berdiri dan Undang- undang yang berbenturan antara Undang-undang RTRW dan Undang-undang RZWP3K itu adalah 100 meter dari bibir pantai tetapi undang-undang RTRW mengikuti dari kondisi fisik lapangan. Fungsi dari pembangunan

jogging track itu juga sebenarnya sebagai pemecah ombak sebab sebelum dilakukan pembangunan pemerintah secara khusus menghitung pukulan ombak sehingga pembangunan *jogging track* itu tetap dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai buktinya daya tampung dan daya dukung tidak seimbang. Ruang representasional (spaces of representations) yang dimaksud dengan wilayah ini adalah “pertemuan” antara praktik spasial yang menggambarkan bagaimana masyarakat menggunakan ruangnya sehari-hari melalui beragam kegiatan dengan representasi ruang sebagaimana pemerintah merencanakan dan mengabstraksikan pengelolaan wilayah menjadi sebuah lokasi *jogging track* yang berguna bagi masyarakat. Di dalamnya terdapat benturan sebab apa yang dilakukan masyarakat dalam wilayah sosialnya kemudian dibenturkan dengan apa yang diabstraksikan dan dikonseptualisasikan oleh pemerintah hingga hal ini kemudian menimbulkan konflik baik horisontal maupun vertikal. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tinggal dan beraktivitas disuatu wilayah yang kuasa dan politiknya dikendalikan dan didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sadar atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, peneliti menganalisis bahwa dinamika ekonomi politik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan *jogging track* ini jika dilihat dari ketiga indikator antara lain sebagai berikut praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasional sangat berkaitan satu sama lain dimana pembangunan *jogging track* ini sudah dilakukan oleh pemerintah akan tetapi untuk representasi ruang yang dirasakan oleh masyarakat dirasa tidak seimbang karena yang mereka dapatkan hanya ketidakadilan dimana awal titik pembangunan tidak melibatkan pada akhirnya masyarakat merasa hanya merekalah yang dirugikan karena telah merusak atau menghilangkan koloni asli mereka.

Produksi Ruang di tinjau dari Aspek Dinamika Ekonomi Politik Tata Ruang Jogging Track

Produksi ruang dapat terjadi dalam pembangunan *jogging track* karena terdapat aktivitas produksi diatas ruang sosial masyarakat lokal. Aktivitas produksi berdampak pada politik penataan ruang. Lefebvre (1991) melihat bagaimana politik penataan ruang terjadi. Ada tiga pihak yang menjadi tempat terjadinya praktik politik penataan ruang. Pertama, praktik keruangan yang dapat dilihat dari perkembangan tata ruang yang terkait dengan masyarakat, pemerintah dan swasta tidak dapat dikesampingkan. Mereka harus saling berhubungan untuk menciptakan tata ruang yang adil sehingga tidak menguntungkan satu pihak saja. Karena jika hal seperti ini terjadi maka akan menimbulkan konflik di masyarakat sehingga akan mengganggu proses penataan ruang. Hal ini dikarenakan perencanaan dalam penataan ruang merupakan elemen dasar yang sangat vital untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang pada saat yang bersamaan. Untuk ekonomi politik oleh Menurut Vincent Mosco (1995), "ekonomi

politik adalah studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang saling merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Dalam hal ini ekonomi politik pun berperan dimana dengan adanya Vincent Mosco mendefinisikan ekonomi politik versi ini sebagai “studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang secara mutual mengatur produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya.” Ia menekankan bahwa ekonomi politik adalah mengenai eksistensi (survival) dan kontrol. Terdapat empat karakteristik utama yaitu perubahan sosial dan sejarah, totalitas sosial, filsafat moral dan praksis. Kedua dilihat fokus dari ekonomi politik adalah alokasi sumber daya (material) yang berkaitan langsung di dalam masyarakat kapitalis, melalui kajian terhadap kepemilikan dan kontrol, dokumen ekonomi politik dan juga melalui analisa hubungan antar kekuasaan, sistem kelas dan berbagai ketidaksetaraan struktural lainnya. produksi ruang tidak selamanya menciptakan ruang yang di inginkan bila di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas ruang tersebut tidak memiliki kesamaan persepsi. Pihak-pihak tersebut yakni Pemerintah Kota, masyarakat pesisir di wilayah pesisir Kelapa Lima, dan pihak swasta. Produksi ruang dalam hubungannya dengan pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan *jogging track* terlihat tidak sepenuhnya disetujui oleh sebagian masyarakat terdampak. Ketiga melalui praktek politik tata ruang dapat dilihat bahwa produksi ruang merupakan produk politik sekaligus sumber daya politik. Ruang sebagai produk politik berarti, penggunaan, pemanfaatandan pengelolaan ruang lahir dari sebuah kebijakan/keputusan politik, yang melibatkan banyak aktor politik dengan motif dan kepentingan berbeda-beda. Di sisi lain ruang yang menjadi sasaran pembangunan *jogging track*, ternyata berbenturan dengan ruang produk masyarakat yang sudah ada sejak lama. dapat dilihat bahwa selain pemerintah masyarakat pun setuju akan pembangunan *jogging track*. Hanya saja ruang yang dikonsepsikan oleh pemerintah untuk pembangunan *jogging track* menjadi masalah, sebab ruang tersebut berbenturan dengan ruang-ruang aktivitas masyarakat yang sudah ada sejak lama. Pemerintah berusaha keras untuk terus melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar produksi ruang dalam hal pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan *jogging track* bisa terealisasi.

Praktik Spasial dalam Pembangunan *Jogging Track* Menjadi Indikator Utama

Manusia adalah produsen ruang sosial. Proses pembentukan ruang dijelaskan melalui konsep triadik produksi ruang, yaitu praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasi (Lefebvre, 1991). Triadik produksi ruang adalah tiga konsep pembentukan ruang yang saling berkaitan. Konsep triadik produksi ruang ini digunakan untuk mengungkapkan proses spasial terbentuknya ruang *jogging track*. Sebelum mengenal *jogging track* masyarakat sudah

memiliki ruang awal sebagai tempat berbagai aktivitas kehidupan berlangsung seperti halnya kegiatan nelayan dan menjual ikan langsung ditempat. Selanjutnya jika dilihat dari paham ekonomi politik Menurut Vincent Mosco (1995), "ekonomi politik adalah studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang saling merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi." Vincent Mosco mendefinisikan ekonomi politik versi ini sebagai "studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang secara mutual mengatur produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya." Ia menekankan bahwa ekonomi politik adalah mengenai eksistensi (survival) dan kontrol. Terdapat empat karakteristik utama yaitu perubahan sosial dan sejarah, totalitas sosial, filsafat moral dan praksis. Fokus dari ekonomi politik adalah alokasi sumber daya (material) di dalam masyarakat kapitalis, melalui kajian terhadap kepemilikan dan kontrol, dokumen ekonomi politik dan juga melalui analisa hubungan antar kekuasaan, sistem kelas dan berbagai ketidaksetaraan struktural lainnya. Karena itu Vincent Mosco menjabarkan 4 (empat) karakteristik inti dari kritikal ekonomi politik yang dapat membantu dalam memahami pendekatan ini, yaitu :

- Perubahan sosial dan sejarah. Karakteristik ini berusaha untuk melanjutkan tradisi dari teoritis klasik, membuka dinamika dari kapitalisme – seperti siklus alami dari kapitalisme, pertumbuhan monopoli modal, aparat Negara, dan lainnya
- Totalitas Sosial. Karakteristik ini berusaha untuk menggambarkan mengenai hubungan antara komoditas, institusi, relasi sosial, dan hegemoni serta mengeksplorasi determinasi diantara elemen-elemen diatas, meskipun beberapa elemen lebih ditekankan daripada elemen yang lainnya
- Filosofi Moral. Teori ekonomi politik kritis mengikutir teoritis klasik yang menekankan pada filosofis moral, termasuk didalamnya tidak hanya analisis dari sistem ekonomi tetapi juga mengenai masalah kebijakan dan moral yang berkembang.

Dalam perjalanan waktu pemerintah menghadirkan konsep *water front city* yang kemudian membutuhkan infrastruktur untuk merealisasikan program *water front city*, maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk membangun *jogging track* sebagai aksesibilitas untuk menarik orang kesitu. Aktivitas dalam pembangunan *jogging track* di daerah pesisir Kelapa Lima adalah bentuk dari praktik spasial di tingkat lokal. Praktik spasial adalah praktik sosial (Lefebvre, 1991) Ruang yang dihasilkan adalah ruang hidup (lived space), ruang yang dikonstruksi melalui interaksi antar manusia dan lingkungan. Area untuk mata pencaharian para nelayan dan tempat berjualan yang kemudian akan dibebaskan untuk didirikan konstruksi

bangunan *jogging track* merupakan bentuk dari praktik spasial dimana hal ini terjadi karena ada pemanfaatan akan ruang yang sudah ada sejak lama. Fenomena ini menunjukkan terjadinya praktik spasial terkait dengan aktivitas produksi dan pertukarannya. Aktivitas produksi masyarakat ini kemudian berbenturan dengan apa yang dikonsepsikan oleh Pemerintah. Dalam hal ini adanya keuntungan yang dihasilkan oleh kaum kapitalis mengenai hal ini dimana dalam pemilik hotel *On The Rock* Bapak Gunawan Satiadharma dan pemilik M hotel dengan penyalahgunakan lahan. Berdasarkan dua pernyataan ini terlihat bahwa praktik spasial dalam proses pembebasan lahan pembangunan *jogging track* terdapat benturan konflik antar ruang yang dikonsepsikan oleh pemerintah dan ruang abstrak yang menjadi lingkup sosial kemasyarakatan. Selain melihat terkait praktik spasial, representasi ruang juga merupakan satu kesatuan Levebvre melihat produksi ruang terjadi di masyarakat lokal. Konsep representasi ruang merujuk pada ruang yang terkonsepsi atau *conceptualized space* yang dilakukan oleh para profesional dan teknokrat seperti arsitek, perencana Kota, insinyur, pengembang atau geografer maupun birokrat lain. Representasi ruang ini penuh berisi jargon, simbol- simbol, objektivikasi maupun paradigma yang digunakan oleh orang maupun institusi. Representasi ruang merupakan dunia yang diabstraksikan, letaknya ada dikepala bukan ditubuh. Lefebvre menamakannya sebagai *conceived space* atau ruang sebagai aspek-aspek non-material atau mental yang terkonsepsi dalam pikiran kita, biasanya ideologi, kekuasaan dan pengetahuan berada dalam representasi ruang ini. Ini adalah ruang yang paling dominan di masyarakat. Representasi ruang memainkan peran penting dalam menciptakan ruang yang ada yang dapat terlihat dalam bentuk fisik seperti monumen dan menara ataupun pabrik bahkan pagar (Merrifield, 2006). Pembentukan ruang *jogging track* dianggap kebijakan spasial yang kurang tepat. Hal ini terjadi karena representasi ruang merupakan ruang yang digunakan tepat di atas ruang hidup masyarakat sebagai tempat aktivitas keseharian mereka. Program *jogging track* yang dikonsepsikan pemerintah demi memajukan kebutuhan ekonomi masyarakat kemudian berbenturan dengan ruang konkret sebagai ruang aktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang *jogging track* tidak sepenuhnya merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melainkan juga merepresentasikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas ruang tersebut. Berdasarkan pernyataan ini peneliti melihat bahwa setelah lahan masyarakat dibebaskan dan mereka harus memilih tempat baru. Kemudian *jogging track* dikonsepsikan menjadi ruang pariwisata. Hal ini menimbulkan pertanyaan ruang ini akan merepresintasikan siapa bila ruang pariwisatanya tidak berbasis masyarakat. Ruang ini bila terrealisasi akan merepresentasikan pihak pemilik modal yang akan berinvestasi terkait kegiatan pariwisata di ruang *jogging track*. Secara tidak langsung maka ada perpanjangan

tangan dari pada ketiga aktor dimana pemerintah sebagai pengeluar kebijakan, legislator sebagai jembatan, pemilik modal sebagai investor dan masyarakat lokal yang akan merasa dirugikan sehingga ekonomi politik pun berkembang. Simbol utama pada lokasi *jogging track* ini ialah sebagai area mencari rejeki sebagai nelayan dan pedagang selain itu juga merupakan area istirahat masyarakat yang selepas mencari ikan. Praktik penataan ruang wilayah pesisir di Kota Kupang menunjukkan dengan jelas kebijakan-kebijakan adanya proses dinamika perebutan ruang ekonomi politik pada pembangunan *jogging track* di wilayah kawasan sempadan pesisir Kelapa Lima Kota Kupang dan kepentingan ekonomi politik antara pemerintah, pengusaha/investor dan masyarakat dalam tata kelola ruang, seperti yang sudah disampaikan oleh Henri Lefebvre (1991).

4. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Kupang melakukan penataan Kota dengan melihat peluang besar di area pesisir sebagai strategi untuk pemerintah dalam hal ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pembangunan *jogging track* merupakan salah satu strategi tepat dengan mengajak masyarakat untuk lebih dekat menikmati laut. Produksi ruang pembangunan *jogging track* di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang memperlihatkan dinamika ekonomi politik dan konflik yang terjadi pada masyarakat di area pesisir. Sebagai kawasan strategis pembangunan *jogging track*, menyebabkan pemerintah masuk dan melakukan produksi ruang publik.

Dinamika ekonomi politik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan *jogging track* ini jika dilihat dari ketiga indikator antara lain sebagai berikut praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasional sangat berkaitan satu sama lain dimana pembangunan *jogging track* ini sudah dilakukan oleh pemerintah akan tetapi untuk representasi ruang yang dirasakan oleh masyarakat dirasa tidak seimbang karena yang mereka dapatkan hanya ketidakadilan dimana awal titik pembangunan tidak dilibatkan pada akhirnya masyarakat merasa hanya merekalah yang dirugikan karena telah merusak atau menghilangkan koloni asli mereka. Masuknya pemerintah menyebabkan praktik spasial yang terjadi didalam masyarakat lokal, berbagai bentuk praktik spasial yang terjadi menyebabkan masyarakat lokal tereliminasi dari ruang tersebut sedangkan representasi ruang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan ruang representasi hanya menguntungkan pemerintah. Dominasi pemerintah membuat masyarakat di area pesisir mengalami ketertundukan kultural sebagaimana dominasi yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat tereliminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif. Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Education and Discussion Platform. (2020). Henri Lefebvre: Dialektika dan produksi ruang. Diakses dari <https://logosid.xyz/henri-lefebvre-dialektika-dan-produksi-ruang/> pada 16 Januari 2023
- Ekobudiharjo. (2011). Penataan ruang dan pembangunan perkotaan. Citra Kreasi.
- Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso.
- Hastira, M., Fichriyadi, M. A., & Yunus, A. (2022). Pendekatan sosio-spasial Lefebvre dalam kebijakan pemanfaatan ruang (Perda RTRW Kota Parepare). Jurnal Ilmu Pemerintahan, 45.
- Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Salemba Humanika.
- Lefebvre, H. (1991). The production of space. Blackwell.
- Lefebvre, H. (2003). Space and the state. In N. Brenner (Ed.), State/space: A reader (pp. 93–105). Blackwell.
- Lefebvre, H. (2009). State, space, world: Selected essays. University of Minnesota Press.
- Li, T. M. (2012). The will to improve: Perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia. Marjin Kiri.
- Mansvelt, J. (2005). Geographies of consumption. SAGE Publications.
- Mas'ood, M. (2003). Ekonomi politik internasional dan pembangunan. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 21(2), 173–204.
- Nawawi, H. (2005). Instrumen penelitian bidang sosial (Cet. 11). Gadjah Mada University Press.
- Neuman, W. L. (2017). Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif (7th ed.). Indeks.
- Niron, E. (2020). Kontestasi politik tata kelola ruang di Kota Kupang (Tesis). Universitas Airlangga.
- Ritzer, G., & Goodman, J. D. (2016). Teori Marxis dan berbagai ragam teori neo-Marxis. Kreasi Wacana.
- Robertus, R. (2014). Ruang sebagai produksi sosial dalam Henri Lefebvre. Diakses dari <https://www.sosial-dalam-Henri-Lefebvre/>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods). Alfabeta.

- Sujadmi, & Bahjatul, M. (2020). Perencanaan tata ruang laut: Konflik, negosiasi.
- Suwarsono, & So, A. Y. (1994). Perubahan sosial dan pembangunan. LP3ES.
- Tolo, E. Y. S. (2017). Akumulasi melalui perampasan dan kemiskinan di Flores. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 19.
- Wilson, J. (2013). The devastating conquest of the lived by the conceived: The concept of abstract space in the world of Henry Lefebvre. *Space and Culture*, 16(3), 364–380.
- Yoppie, C., et al. (2018). Ekonomi politik konflik agraria pulau kecil (Studi kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.